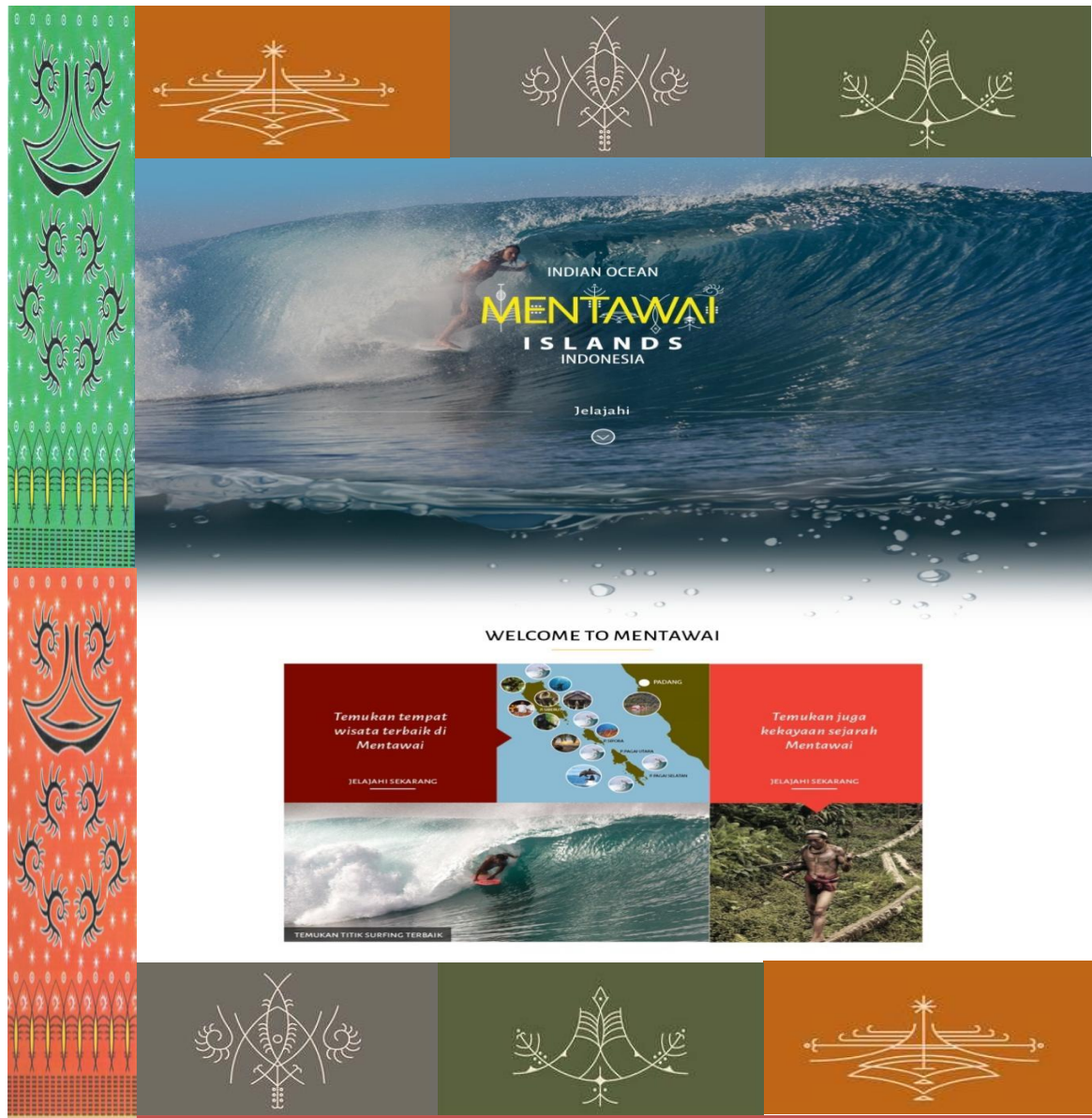


RENCANA KERJA INSPEKTORAT (RENJA) Perubahan Tahun 2025



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
INSPEKTORAT

Jl. Raya Tuapejat Km. 9 Sipora Utara Tel. (0759) 320651 Fax.(0759) 320212
Email :inspektoratmtw@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Karunianya, sehingga Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan Anggaran tahun 2025 yang merupakan rencana kerja tahunan. Rencana Kerja (Renja) Perubahan Anggaran adalah dokumen perencanaan perubahan dari Rencana Kerja Murni yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Rencana kerja perubahan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) dan dokumen perencanaan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Dengan demikian rencana kerja perubahan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan turunan dan bagian tak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, dan RPD serta Renstra 2023-2026.

Rencana kerja perubahan dibuat hampir setiap tahun dengan mendasarkan pada rencana strategis, dan evaluasi Rencana Kerja Tahun 2025 Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai sampai bulan Maret 2025 atau di TW I, rencana kerja perubahan disusun sebagai panduan pelaksanaan anggaran, program, dan kegiatan perubahan tahun 2025.

Kami telah mengoptimalkan seluruh kemampuan untuk menyajikan perubahan rencana kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2025 dengan baik, namun karena keterbatasan banyak hal, maka kami menyadari bahwa rencana kerja perubahan ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu masukan dan saran perbaikan dari semua pihak akan diterima dengan senang

hati untuk perbaikan penyusunan di masa perbaikan dari semua pihak akan diterima dengan senang hati untuk perbaikan penyusunan di masa yang akan datang.

Semoga rencana kerja perubahan ini bermanfaat menjadi bagian dari keinginan bersama untuk perbaikan berkelanjutan bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Tuapejat, April 2025
Inspektur

Serieli Bawamenewi, SH
19830905 200802 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DNEGAN TRIWULAN II TAHUN 2024.....	7
2.1 Evaluasi Renja Kerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 ...	7
2.2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	18
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	20
BAB IV PENUTUP	26
LAMPIRAN	27

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Tahun 2024	7
Tabel 2.2 Sasaran, Program, Indikator, Target dan Realisasi 2024, Target 2025.....	8
Tabel 2.3 Anggaran dan Capai Realisasi Keuangan dan Fisik Inspektorat sampai dengan Triwulan I (Maret 2025)	10
Tabel 2.4 Evaluasi Terhadap Hasil Renja triwulan I Inspektorat Perangkat Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2025.....	15
Tabel 3.1 Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai	21

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat program, kegiatan, serta sub-kegiatan pengawasan yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel. Dokumen ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat serta bagian integral dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Seiring dengan dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, seringkali diperlukan penyesuaian terhadap rencana kerja yang telah disusun, agar tetap selaras dengan perubahan kebijakan, regulasi, kondisi keuangan daerah, serta isu-isu strategis yang berkembang. Oleh karena itu, penyusunan Perubahan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2025 menjadi langkah strategis untuk menjaga relevansi, efektivitas, dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan.

Beberapa alasan utama dilakukannya perubahan Renja antara lain adalah adanya:

1. Penyesuaian terhadap perubahan kebijakan nasional dan daerah, termasuk perubahan prioritas pembangunan dan penganggaran.
2. Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan semester pertama yang menunjukkan perlunya penguatan atau realokasi sumber daya.
3. Masukan dari hasil pengawasan internal maupun eksternal yang perlu segera ditindaklanjuti dalam bentuk kegiatan atau penguatan sistem pengendalian intern.

4. Dinamika organisasi, termasuk perubahan struktur atau tugas dan fungsi yang memengaruhi pelaksanaan kegiatan.

Dalam rangka memastikan bahwa fungsi pengawasan berjalan secara optimal dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, maka perubahan Renja Inspektorat ini disusun secara sistematis dengan tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, serta mendukung pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan publik.

Dengan adanya perubahan Renja ini, diharapkan Inspektorat dapat terus memainkan peran strategisnya sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang andal dalam menjaga integritas, efisiensi, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Salah satu tujuan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang tercantum dalam Rancangan awal Perubahan RKPD Tahun 2025 yaitu Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Akuntabel, Transparan dan Melayani. Sasaran dari tujuan tersebut adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya kapabilitas pemerintahan dan Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat daerah, dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang setiap tahunnya memuat kebijakan, program, dan kegiatan Pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang membutuhkan partisipasi masyarakat.

Untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran maka Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam Penyusunan Perubahan

Rencana Kerja Anggaran Tahun 2025 serta menjadi dasar Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS).

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 didasarkan pada peraturan yang mengait yaitu:

1. undang-undang nomor 49 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2000;
2. undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang cipta Kerja;
4. undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
10. peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 7 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kepulauan Mentawai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 54 Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 dimaksudkan sebagai pedoman bagi Inspektorat Daerah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2025 serta untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya yang ada.

Perubahan Rencana Kerja ini didasarkan pada Rencana Perubahan RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2025 dan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2023-2026.

2. Tujuan

Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah adalah untuk :

1. sebagai landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2025 dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Inpektorat Daerah;
2. menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
3. memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan;
4. mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi melalui capaian target kinerja program dan kegiatan;
5. memantapkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dengan meningkatkan kualitas pengawasan yang lebih professional;
6. meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam menjamin efektifitas system pengendalian intern untuk mencapai tujuan organisasi pemerintahan;
7. memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, sasaran dan kebijakan pengawasan internal;
8. sebagai bahan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025

2.1 Evaluasi Rencana Kerja sampai dngan Triwulan I Tahun 2025

2.2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran output kegiatan, penambahan kegiatan baru/ kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, Lokasi kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah tersebut mencakup semua Rencana Program dan kegiatan Prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja langsung dan belanja tidak langsung sebagaimana table Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

BAB IV Penutup

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Rencana Kerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Daerah sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana Pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan rencana kerja perubahan diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana kerja tahun sebelumnya sampai dengan Triwulan I tahun 2025, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Inspektorat Daerah.

Hasil evaluasi capaian kinerja Inspektorat Tahun 2024 telah disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Tahun 2024

Sasaran Inspektorat	Indikator Sasaran	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024
Meningkatnya Kapabilitas Pemerintah	Maturitas SPIP	Level 3	Level 3
	Persentase Tindak Lanjut Temuan	85%	71,63%
	Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Opini BPK	WTP	WTP
	WBK/ WBBM	3 OPD	0 OPD
	Nilai SAKIP	Nilai B	Nilai BB
	Persentase OPD yang telah menerapkan SPIP	86%	100%

Sumber : Lakip Inspektorat Tahun 2024

Inspektorat Daerah pada tahun 2025 memiliki 3 program yaitu 2 Program yang mengampu pengawasan dan 1 program penunjang program pengawasan. Adapun program yang dimaksudkan adalah:

Tabel 2.2
Sasaran, Program, Indikator, Target 2024, Realisasi 2024 dan Target 2025

Sasaran	Program Inspektorat	Indikator Program	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025
Meningkatnya Kualitas Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Kepatuhan penyusunan Perencanaan dan pelaporan tugas layanan perangkat daerah	100%	100%	100%
Meningkatnya Kapabilitas Pemerintahan	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3
		Persentase Tindak Lanjut Temuan	85%	71.63%	88%
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Program Perumusan Kebijakan dan Asistensi	Persentase OPD yang telah menerapkan SPIP	86%	100%	88%

Total Anggaran Inspektorat Daerah Tahun 2025 (APBD Murni) sebesar Rp.10.717.498.810,- (Sepuluh Milyar Tujuh Ratus Tujuh Belas Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ratus Sepuluh Rupiah,-) dengan rincian belanja operasional sebesar Rp. 10.516.782.929,- (Sepuluh Milyar Lima Ratus Enam Belas Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh

Sembilan Rupiah,-) dan belanja modal sebesar Rp. 200.715.881,-. (Dua Ratus Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah,-). Pagu Pergeseran Efisiensi sebesar 8.720.997.280,- (Delapan Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah) dengan rincian belanja operasional sebesar Rp. 8.586.995.946,- (Delapan Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Rupiah) dan belanja modal sebesar Rp. 134.001.342,- (Seratus Tiga Puluh Empat Juta Seribu Tiga Ratus Empat Puluh Dua Rupiah) Dari total anggaran tersebut telah terealisasi sebesar Rp. 1.442.787.720,- (Satu Milyar Empat Ratus Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah,-) untuk belanja operasional sebesar Rp. 1.442.787.720,- (Satu Milyar Empat Ratus Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah,-) dan belanja modal sebesar Rp. 0,-. (Nol Rupiah,-) dengan capaian kinerja keuangan sebesar **16,54%**.

Keterkaitan pencapaian kinerja program dan kegiatan dalam mewujudkan tujuan, sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra) bahwa kegiatan-kegiatan secara umum dilaksanakan dengan baik. Adapun evaluasi sampai dengan TW I Tahun 2025 (Maret 2025) dari program, kegiatan dan sub kegiatan secara rinci sebagai berikut:

Tabel 2.3
Anggaran dan Capaian Realisasi Keuangan dan Fisik Inspektorat
sampai dengan Triwulan I (Maret 2025)

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Anggaran Pergeseran Efisiensi	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)
1.	INSPEKTORAT	10.717.498.810,-	8.720.997.288,-	1.442.787.728,-	16,54%	16,54%
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	7.368.399.610,-	7.210.062.088,-	1.317.611.228,-	18,27%	18,3%
A.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.312.500.214,-	4.573.629.846,-	1.127.920.350,-	24,66%	24,66%
1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	4.187.700.214,-	4.465.099.846,-	1.118.930.350,-	25.1%	25.1%
1.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	124.800.000,-	108.530.000,-	8.990.000,-	24.8%	24.8%
A.2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	704.250.200,-	543.270.000,-	14.710.100,-	2.7%	2.7%
2.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	704.250.200,-	543.270.000,-	14.710.100,-	2.7%	2.7%
A.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.234.273.600,-	1.170.969.900,-	105.667.900,-	9.02%	9.02%
3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	13.000.000,-	7.902.500,-	0,-	0%	0%
3.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	51.357.000,-	33.357.000,-	0,-	0%	0%
3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	124.846.400,-	86.134.400,-	13.888.200,-	16.1%	16.1%
3.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	15.000.000,-	15.000.000,-	1.224.500,-	8.2%	8.2%
3.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	30.000.000,-	30.000.000,-	1.600.000,-	5.3%	5.3%
3.6	Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.000.070.200,-	998.576.000,-	88.155.200,-	8.8%	8.8%

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Anggaran Pergeseran Efisiensi	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)
A.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	154.015.881,-	105.301.342,-	0,-	0%	0%
4.1	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	154.015.881,-	105.301.342,-	0,-	0%	0%
A.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	681.761.000,-	691.961.000,-	45.503.214,-		
5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	95.900.000,-	95.400.000,-	14.173.214,-	14.9%	14.9%
5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	585.861.000,-	596.561.000,-	31.330.000,-	5.3%	5.3%
A.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	281.598.715,-	124.930.000,-	24.609.664,-	6,58%	6,58%
6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	13.986.000,-	13.986.000,-	2.396.000,-	17.1%	17.1%
6.2	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	34.004.000,-	34.004.000,-	12.375.164,-	36.4%	36.4%
6.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.540.000,-	26.540.000,-	9.838.500,-	37.1%	37.1%
6.4	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	207.068.715,-	50.400.000,-	0,-	0%	0%
B	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	2.572.551.500,-	1.046.676.800,-	125.176.500,-	12.0%	12.0%
B.1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	2.220.025.300,-	770.145.800,-	69.445.000,-	9.02%	9.02%
1.1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	199.655.800,-	36.059.000,-	0,-	0%	0%
1.2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	199.466.800,-	35.870.000,-	0,-	0%	0%

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Anggaran Pergeseran Efisiensi	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)
1.3	Reviu Laporan Kinerja	627.339.000,-	152.889.000,-	49.500.000,-	32.4%	32.4%
1.4	Reviu Laporan Keuangan	67.763.600,-	37.682.200,-	0,-	0%	0%
1.5	Pengawasan Desa	579.499.600,-	162.143.200,-	0,-	0%	0%
1.6	Kerjasama Pengawasan Internal	296.300.500,-	277.874.000,-	0,-	0%	0%
1.7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Pemeriksaan APIP	250.000.000,-	67.628.400,-	19.945.000,-	29.5%	29.5%
B.2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	352.526.200,-	376.531.000	55.731.500,-	20.2%	20.2%
2.1	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	352.526.200,-	376.531.000	55.731.500,-	20.2%	20.2%
C	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	776.547.700,-	464.258.400,-	0,-	0%	0%
C.1	Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Fasilitasi Pengawasan	119.988.600,-	108.832.000,-	0,-	0%	0%
1.1	Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Fasilitasi Pengawasan	119.988.600,-	108.832.000,-	0,-	0%	0%
C.2	Pendampingan Dan Asistensi	656.559.100,-	355.426.400,-	0,-	0%	0%
2.1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	150.033.700,-	66.798.200,-	0,-	0%	0%
2.2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	99.989.600,-	29.700.000,-	0,-	0%	0%
2.3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	326.541.800,-	205.303.800,-	0,-	0%	0%
2.4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	79.994.000,-	53.624.400,-	0,-	0%	0%

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Anggaran Pergeseran Efisiensi	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)
Total		10.717.498.810,-	8.720.997.288,-	1.442.787.728,-		

Sumber: Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bulan Maret 2025 dan Data Fungsional s.d Maret 2025

Berdasarkan hasil evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan bahwa pelaksanaan dalam tahun berjalan (Selama TW I Tahun 2025) masih terdapat sub kegiatan yang belum terealisasi, hal ini disebabkan oleh :

1. Keterlambatan Proses Perencanaan dan Penganggaran

- Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) belum selesai tepat waktu.
- Revisi anggaran atau penyesuaian kegiatan masih dalam proses.
- Kegiatan belum bisa dilaksanakan karena menunggu persetujuan dari pimpinan atau instansi terkait.

2. Keterlambatan Administrasi Pengadaan

- Proses pengadaan barang/jasa belum dimulai atau tertunda.
- Belum adanya pejabat pengadaan atau pokja pemilihan.
- Masih dalam proses penyusunan dokumen teknis/lelang.

3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

- SDM pelaksana kegiatan belum tersedia atau masih sibuk dengan kegiatan lain.
- Keterbatasan auditor atau tim pemeriksa menyebabkan kegiatan pengawasan tertunda.

4. Kondisi Lapangan dan Teknis

- Beberapa kegiatan inspeksi atau pengawasan memerlukan kunjungan lapangan yang tidak bisa dilakukan karena cuaca buruk atau lokasi sulit dijangkau.

- Adanya bencana alam atau kondisi darurat lain yang menghambat pelaksanaan kegiatan.

5. Masalah Koordinasi Antar Instansi

- Kegiatan pengawasan lintas OPD/instansi memerlukan koordinasi, namun jadwal mitra belum sinkron.
- Pihak yang diawasi belum siap menerima pemeriksaan.

6. Perubahan Kebijakan atau Prioritas

- Adanya perubahan fokus program dari pimpinan, sehingga kegiatan harus dijadwal ulang.
- Revisi rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) atau program strategis nasional.

7. Kendala Teknis Lainnya

- Aplikasi pendukung pengawasan atau pelaporan belum optimal.
- Masalah dalam penggunaan SIPD, SIMDA, atau aplikasi internal Inspektorat.

Secara rinci evaluasi output per sub kegiatan dapat dilihat pada Laporan sampai dengan Triwulan I (Maret 2025) Evaluasi Terhadap Hasil Renja Inspektorat Daerah Tahun Anggaran 2025 (data fungsional Subbag Keuangan) sebagai berikut:

**Tabel 2.4 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Triwulan I
Inpektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2025**

No	Sasaran OPD	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Yang Di Evaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
								I		II		III		IV									
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7x100%	14=6+12	15=14/5x100%								
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
6.01.01	Meningkatnya Kualitas Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA			10,535,921,000	12,807,734,341	7,210,062,088	1,317,611,228	-	-	-	1,317,611,228			14,125,345,569								
6.01.01.2.01		PERINCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH			150,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-		-								
6.01.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dokumen	150,000,000	0	0	0	-													
6.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH			5,500,000,000	7,788,752,821	4,573,629,846	1,127,920,350	-	-	-	-	1,127,920,350			8,916,673,171							
6.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	37	Orang/ Bulan	5,000,000,000	74	7,649,175,821	36	4,465,099,846	36	1,118,930,350		36	1,118,930,350	100.00	25.05946986	110	8,768,106,171	297.30	175.36	Inspektorat	
6.01.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	25	Orang	500,000,000	36	139,577,000	12	108,530,000	3	8,990,000		3	8,990,000	25.00	8.28	39	148,567,000	156.00	29.71	Inspektorat	
6.01.01.2.03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH			100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-						
6.01.01.2.03.0001		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	Bk/b	100,000,000																	
6.01.01.2.05		ADMINISTRASI KETEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH			400,000,000	728,619,742	543,270,000	14,710,100	-	-	-	14,710,100				743,329,842							
6.01.01.2.05.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25	Orang	400,000,000	25	728,619,742	10	543,270,000	1	14,710,100		1	14,710,100	10.00	2.71	26	743,329,842	102.00	185.83	Inspektorat	
6.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH			1,320,000,000	2,263,083,589	1,170,969,900	104,867,900	-	-	-	104,867,900				2,367,951,489							
6.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	30	Paket	60,000,000	2		1	7,902,500	-			0	0	0.00	0.00	2		6.67	0.00	Inspektorat	
6.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	6	Paket	450,000,000																	
6.01.01.2.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Rumah Tangga yang disediakan	4	Paket	150,000,000	4	17,962,657	1	33,357,000	-			0	0	0.00	0.00	4	17,962,657	100.00	11.98	Inspektorat	
6.01.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	3	Paket	250,000,000	8	293,921,000	3	86,134,400	1	13,888,200		1	13,888,200	33.33	16.12	9	307,809,200	300.00	123.12	Inspektorat	
6.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	3	Paket	70,000,000	2	36,306,320	2	15,000,000	1	1,234,500		1	1,234,500	50.00	8.16	3	37,530,820	100.00	53.62	Inspektorat	
6.01.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	2	Dokumen	40,000,000	3	46,975,000	1	30,000,000		1,600,000		0	1,600,000	0.00	5.33	3	48,575,000	150.00	121.44	Inspektorat	
6.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	300,000,000	24	1,867,918,612	12	998,576,000	3	88,155,200		3	88,155,200	25.00	8.83	27	1,956,073,812	225.00	652.02	Inspektorat	
6.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH			1,350,000,000	419,993,000	105,301,342	-	-	-	-	-	-		-		419,993,000						
6.01.01.2.07.0001		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	1	Unit	450,000,000		-	0								-	0.00	0.00		0.00		Inspektorat
6.01.01.2.07.0002		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	10	Unit	300,000,000														0.00			
6.01.01.2.07.0005		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	3	Paket	250,000,000														0.00			
6.01.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	3	Unit	150,000,000	13	419,993,000	8	105,301,342	-			0	0	0.00		13	419,993,000	433.33	280.00	Inspektorat	
6.01.01.2.07.0008		Pengadaan Aset Tak Berwujud Lainnya	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud Lainnya yang disediakan	-	0	-		0															
6.01.01.2.07.0010		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1	Unit	200,000,000																	

No	Sasaran OPD	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Yang Di Evaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025(%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
								I				II				III									IV			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7x100%	14=6+12	15=14/5x100%														
6.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
					915,921,000		1,141,985,086		691,961,000		45,503,214		-		-		45,503,214				1,187,488,300							
6.01.01.2.08.0002		Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	Laporan	180,000,000	72	163,570,966	36	95,400,000	9	14,173,214				9	14,173,214	25.00	14.86	81	177,744,180	675.00	98.75	Inspektorat				
6.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12	Laporan	735,921,000	23	978,414,120	12	596,561,000	3	31,330,000				3	31,330,000	25.00	5.25	26	1,009,744,120	216.67	137.21	Inspektorat				
6.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH			800,000,000		465,300,103		124,930,000		24,609,664		-		-		24,609,664				489,909,767							
6.01.01.2.09.0001		Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	15	Unit	200,000,000	2	91,339,296	1	13,986,000		2,396,000				0	2,396,000	0.00	17.13	2	93,735,296	13.33	46.87	Inspektorat				
6.01.01.2.09.0002		Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	15	Unit	200,000,000	12	57,195,160	6	34,004,000	2	12,375,164				2	12,375,164	33.33	36.39	14	69,570,324	93.33	34.79	Inspektorat				
6.01.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	8	Unit	50,000,000	6	68,030,000	3	26,540,000	1	9,838,500				1	9,838,500	33.33	37.07	7	77,868,500	87.50	155.74	Inspektorat				
6.01.01.2.09.0009		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1	Unit	200,000,000	1	248,735,647	1	50,400,000		-				0	0	0.00	0.00	1	248,735,647	100.00	124.37	Inspektorat				
6.01.01.2.09.0011		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1	Unit	150,000,000																						
6.01.02	Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			4,750,000,000				1,046,676,800		125,176,500		-		-		125,176,500											
6.01.02.2.01		PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL			3,900,000,000		4,020,026,205		770,145,800		69,445,000		-		-		69,445,000				3,256,315,999							
6.01.02.2.01.0001		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	24	Laporan	550,000,000	42	539,164,900	12	36,059,000		-				0	0	0.00	0.00	42	539,164,900	175.00	98.03	Inspektorat				
6.01.02.2.01.0002		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	24	Laporan	550,000,000	16	264,314,000	12	35,870,000		-				0	0	0.00	0.00	16	264,314,000	66.67	48.06	Inspektorat				
6.01.02.2.01.0003		Revisi Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Kinerja	108	Laporan	550,000,000	216	761,766,499	108	152,889,000	98	49,500,000				98	49,500,000	90.74	32.38	314	811,266,499	290.74	147.50	Inspektorat				
6.01.02.2.01.0004		Revisi Laporan Keuangan	Jumlah Laporan hasil Revisi Laporan Keuangan	37	Laporan	200,000,000	74	67,126,600	37	37,682,200		-				0	0	0.00	0.00	74	67,126,600	200.00	33.56	Inspektorat				
6.01.02.2.01.0005		Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	20	Laporan	1,000,000,000	28	1,199,632,300	37	162,143,200		-				0	0	0.00	0.00	28	1,199,632,300	140.00	119.96	Inspektorat				
6.01.02.2.01.0006		Kerja sama Pengawasan Internal	Jumlah kesepakatan Pengawasan Internal yang terbentuk	2	Kesepakatan	600,000,000	4	-	2	277,874,000		-				0	0	0.00	0.00	4	-	200.00	0.00	Inspektorat				
6.01.02.2.01.0007		Monitoring dan evaluasi Tindak lanjut HASIL Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Pemeriksaan APUP	Jumlah Dokumen hasil monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APUP	2	Dokumen	450,000,000	4	354,866,700	4	67,628,400	1	19,945,000				1	19,945,000	25.00	29.49	5	374,811,700	250.00	83.29	Inspektorat				
6.01.02.2.02		PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU			850,000,000		486,488,450		276,531,000		55,731,500		-		-		55,731,500				542,219,950							
6.01.02.2.02.0001		Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/ daerah yang ditangani	2	Laporan	300,000,000																						
6.01.02.2.02.0002		Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	12	Laporan	550,000,000	24	486,488,450	12	276,531,000	2	55,731,500				2	55,731,500	16.67	20.15	26	542,219,950	216.67	98.59	Inspektorat				

No	Sasaran OPD	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Yang Di Evaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025(%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
								I		II		III		IV												
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			1,900,000,000		650,647,962		464,258,400	-	-	-	-	-	-	-	-					650,647,962				
6.01.03.2.01		PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN DAN FASILITASI PENGAWASAN			500,000,000		204,877,600		108,832,000	-	-	-	-	-	-	-	-					204,877,600				
6.01.03.2.01.0001		Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang disusun	4	Rekomendasi		200,000,000		-	-	-	-	-	-	-	-	-									
6.01.03.2.01.0002		Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang disusun	2	Rekomendasi		300,000,000	4	204,877,600	2	108,832,000	-	-	-	-	0	0	0.00	0.00	4	204,877,600	200.00	68.29	Inspektorat		
6.01.03.2.02		PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			1,400,000,000		445,770,362		355,426,400	-	-	-	-	-	-	-	-					445,770,362				
6.01.03.2.02.0001		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	6	Perangkat Daerah		450,000,000	8	64,462,000	4	66,798,200	-	-	-	-	0	0	0.00	0.00	8	64,462,000	133.33	14.32	Inspektorat		
6.01.03.2.02.0002		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	26	Perangkat Daerah		250,000,000	20	111,281,800	10	29,700,000	-	-	-	-	0	0	0.00	0.00	20	111,281,800	76.92	44.51	Inspektorat		
6.01.03.2.02.0003		Koordinasi, Monitoring danEvaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	5	Kegiatan		450,000,000	8	130,679,890	5	205,303,000	-	-	-	-	0	0	0.00	0.00	8	130,679,890	160.00	29.04	Inspektorat		
6.01.03.2.02.0004		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	5	Perangkat Daerah		250,000,000	4	139,346,672	2	53,624,400	-	-	-	-	0	0	0.00	0.00	4	139,346,672	80.00	55.74	Inspektorat		
					17,185,921,000		13,458,382,303		8,720,997,288		1,442,787,728	-	-	-	-	1,442,787,728	16.54				14,775,993,531					
												-	-	-	-											

2.1 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Inspektorat Daerah, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

a. Permasalahan dan hambatan internal :

1. Sumber daya dan kompetensi aparatur masih terbatas seperti :
 - a) Sertifikat manajerial Pimpinan APIP (33%)
 - b) Ketersediaan Auditor/PPUPD Ahli Pertama (32%)
 - c) Ketersediaan Auditor/PPUPD Ahli Muda (35%)
 - d) Ketersediaan Auditor/PPUPD Ahli Madya (66%)
2. Sumber daya anggaran masih terbatas seperti :
 - a) Belum terpenuhinya anggaran Inspektorat 1% dari pagu anggaran daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Penyusunan APBD setiap tahun;
 - b) Belum terpenuhinya insentif pengawasan.
3. Sarana dan prasarana penunjang operasional masih terbatas :
 - a) 30% Auditor/PPUPD belum didukung fasilitas kerja yang memadai;
 - b) ruangan pemeriksaan belum memadai;
 - c) ruangan kerja belum memadai.

b. Permasalahan dan hambatan eksternal yang dihadapi dalam menjalankan fungsi diantaranya:

1. Kebijakan yang masih tumpang tindih dan sering berubah-ubah;
2. Perubahan lingkungan sosial, ekonomi dan politik;

3. Koordinasi lintas OPD belum optimal;
4. Adaptasi terhadap perkembangan teknologi belum optimal;
5. Tingkat kepercayaan masyarakat pada instansi pemerintah masih rendah;
6. Benturan kepentingan.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan kondisi perkembangan isu-isu terkini khususnya dalam menyelenggarakan fungsi Inspektorat Daerah perlu melakukan penyesuaian Rencana Kerja Tahun 2025 dengan menyesuaikan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. Efisiensi anggaran mengharuskan evaluasi dan penetapan kembali Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun Anggaran 2025. Hal ini mengakibatkan perlu dilakukan peninjauan kembali target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Adapun perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Inspektorat Daerah Tahun 2025 tidak lepas dari Perbup tentang Perubahan RKPD Tahun 2025. Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Inspektorat Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.1:

Tabel 3.1 Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran		Anggaran		Selisih
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
	INSPEKTORAT				10.717.498.810,-	8.720.997.288,-	1.996.501.522
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Kepatuhan Penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	100 %	100 %	7.368.399.610,-	7.210.062.088,-	158.337.522
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kesejahteraan ASN dilingkungan Inspektorat Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	4.312.500.214,-	4.573.629.846,-	261.129.632
6.01.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	37 orang	37 orang	4.187.700.214,-	4.465.099.846,-	277.399.632
6.01.01.2.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	124.800.000,-	108.530.000,-	16.270.000
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	704.250.200,-	543.270.000,-	160.980.200
6.01.01.2.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 orang	10 orang	704.250.200,-	543.270.000,-	160.980.200
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	1.234.273.600,-	1.170.969.900,-	63.303.700
6.01.01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	13.000.000,-	7.902.500,-	5.097.500
6.01.01.2.06.003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2 Paket	51.357.000,-	33.357.000,-	18.000.000

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran		Anggaran		Selisih
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
6.01.01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	3 Paket	3 Paket	124.846.400,-	86.134.400,-	38.712.000
6.01.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	2 Paket	2 Paket	15.000.000,-	15.000.000,-	-
6.01.01.2.06.008	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,-	30.000.000,-	-
6.01.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Raat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	1.000.070.200,-	998.576.000,-	1.494.200
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kelancaran operasional pelaksanaan kegiatan OPD Terlaksananya Pengadaan BMD urusan Perangkat Daerah	100 %	100 %	154.015.881,-	105.301.342,-	48.714.539
6.01.01.2.07.006	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	8 Unit	8 Unit	154.015.881,-	105.301.342,-	48.714.539
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Lancarnya Operasional Perkantoran Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	681.761.000,-	691.961.000,-	10.200.000
6.01.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	36 laporan	36 laporan	95.900.000,-	95.400.000,-	500.000
6.01.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa Pelayanan umum Kantor yang disediakan	12 laporan	12 laporan	585.861.000,-	596.561.000,-	10.700.000
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kinerja perangkat daerah sesuai dengan tupoksi Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	281.598.715,-	124.930.000,-	156.668.715

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran		Anggaran		Selisih
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
6.01.01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	1 Unit	13.986.000,-	13.986.000,-	-
6.01.01.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	6 Unit	34.004.000,-	34.004.000,-	-
6.01.01.2.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	3 Unit	3 Unit	26.540.000,-	26.540.000,-	-
6.01.01.2.09.009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	207.068.715,-	50.400.000,-	156.668.715
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Tindak Lanjut Temuan Meningkatnya Kepuasan Stakeholder	100 % 88 %	100 % 88 %	2.572.551.500,-	1.046.676.800,-	1.525.874.700
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pedoman bagi Kepala SKPD, ASN dan Aparatur Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Terlaksananya Pengawasan Internal	100%	100%	2.220.025.300,-	770.145.800,-	1.449.879.500
6.01.02.2.01.001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	12 Laporan	12 Laporan	199.655.800,-	36.059.000,-	163.596.800
6.01.02.2.01.002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	12 Laporan	12 Laporan	199.466.800,-	35.870.000,-	163.596.800

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran		Anggaran		Selisih
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
6.01.02.2.01.003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	108 Laporan	108 Laporan	627.339.000,-	152.889.000,-	474.450.000
6.01.02.2.01.004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	37 Laporan	37 Laporan	67.763.600,-	37.682.200,-	30.081.400
6.01.02.2.01.005	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	37 Laporan	37 Laporan	579.499.600,-	162.143.200,-	417.356.400
6.01.02.2.01.006	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang terbentuk	2 Kesepakatan	2 Kesepakatan	296.300.500,-	277.874.000,-	18.426.500
6.01.02.2.01.007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2 Dokumen	2 Dokumen	250.000.000,-	67.628.400,-	182.371.600
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Meningkatnya Kepuasan Stakeholder Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan dengan tujuan tertentu	100%	100%	352.526.200,-	376.531.000	24.004.800
6.01.02.2.02.002	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	12 Laporan	12 Laporan	352.526.200,-	376.531.000	24.004.800
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Meningkatnya Zona Integritas Level Kapabilitas Persentase OPD yang telah menerapkan SPIP	88 % Level 3 86 OPD	88 % Level 3 86 OPD	776.547.700,-	464.258.400,-	312.289.300
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Implementasi terhadap Kebijakan Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	100%	100%	119.988.600,-	108.832.000,-	11.156.600

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran		Anggaran		Selisih
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
6.01.03.2.01.002	Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang disusun	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	119.988.600,-	108.832.000,-	11.156.600
6.01.03.2.02	Pendampingan Dan Asistensi	Meningkatnya Kinerja SKPD yang dilakukan pendampingan Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi Terlaksananya Zona Integritas	100%	100%	656.559.100,-	355.426.400,-	301.132.700
6.01.03.2.02.001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Urusan Pemerintah Daerah	4 Perangkat Daerah	4 Perangkat Daerah	150.033.700,-	66.798.200,-	83.235.500
6.01.03.2.02.002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Refomasi Birokrasi	10 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	99.989.600,-	29.700.000,-	70.289.600
6.01.03.2.02.003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	5 Kegiatan	5 Kegiatan	326.541.800,-	205.303.800,-	121.238.000
6.01.03.2.02.004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	2 Perangkat Daerah	2 Perangkat Daerah	79.994.000,-	53.624.400,-	26.369.600
Total					10.717.498.810,-	8.720.997.288,-	1.996.501.522

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2025 ini mengacu pada hasil evaluasi Rencana Kerja Triwulan I Tahun 2025 sampai bulan Maret 2025 yang merupakan bagian dari rangkaian perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan kegiatan. Perubahan renja ini juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Ara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, maka Perangkat Daerah termasuk Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai berkewajiban Menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat daerah yang berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2025.

Perhitungan kebutuhan program, kegiatan dan sub kegiatan menyesuaikan stradarisasi harga barang dan jasa yang ada di SIPD RI Kemendagri yang sudah di *update* oleh Instansi yang berwenang di Kabupaten Kepulauan Mentawai dan telah disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang harus segera dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2025 telah disesuaikan dengan hasil rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan terdapat perubahan pagu indikatif secara total pagu.

Tuapejat, April 2025
Inspektur Daerah

Serieli Bawamenewi, SH
19830905 200802 1 001

EVALUASI RENJA INSPEKTORAT KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2025

No	Sasaran OPD	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Yang Di Evaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							I				II					III				IV							
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%			
6.01.01	Meningkatnya Kualitas Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA			10,535,921,000	12,807,734,341	7,210,062,088	1,317,611,228	-	-	-	-	-	1,317,611,228			14,125,345,569										
6.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH			150,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.01.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dokumen	150,000,000	0	0	0	-																	
6.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH			5,500,000,000	7,788,752,821	4,573,629,846	1,127,920,350	-	-	-	-	-	1,127,920,350			8,916,673,171										
6.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	37	Orang/ Bulan	5,000,000,000	74	7,649,175,821	36	4,465,099,846	36	1,118,930,350					36	1,118,930,350	100.00	25.0594699	110	8,768,106,171	297.30	175.36		Inspektorat	
6.01.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	25	Orang	500,000,000	36	139,577,000	12	108,530,000	3	8,990,000					3	8,990,000	25.00	8.28	39	148,567,000	156.00	29.71		Inspektorat	
6.01.01.2.03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH			100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.01.01.2.03.0001		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	Rkb	100,000,000																					
6.01.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH			400,000,000	728,619,742	543,270,000	14,710,100	-	-	-	-	-	14,710,100			743,329,842										
6.01.01.2.05.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25	Orang	400,000,000	25	728,619,742	10	543,270,000	1	14,710,100					1	14,710,100	10.00	2.71	26	743,329,842	102.00	185.83		Inspektorat	
6.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH			1,320,000,000	2,263,083,589	1,170,969,900	104,867,900	-	-	-	-	-	104,867,900			2,367,951,489										
6.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	30	Paket	60,000,000	2		1	7,902,500		-					0	0	0.00	0.00	2		6.67	0.00		Inspektorat	
6.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	6	Paket	450,000,000																					
6.01.01.2.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Rumah Tangga yang disediakan	4	Paket	150,000,000	4	17,962,657	1	33,357,000		-					0	0	0.00	0.00	4	17,962,657	100.00	11.98		Inspektorat	
6.01.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	3	Paket	250,000,000	8	293,921,000	3	86,134,400	1	13,888,200					1	13,888,200	33.33	16.12	9	307,809,200	300.00	123.12		Inspektorat	
6.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	3	Paket	70,000,000	2	36,306,320	2	15,000,000	1	1,224,500					1	1,224,500	50.00	8.16	3	37,530,820	100.00	53.62		Inspektorat	
6.01.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	2	Dokumen	40,000,000	3	46,975,000	1	30,000,000		1,600,000					0	1,600,000	0.00	5.33	3	48,575,000	150.00	121.44		Inspektorat	
6.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	300,000,000	24	1,867,918,612	12	998,576,000	3	88,155,200					3	88,155,200	25.00	8.83	27	1,956,073,812	225.00	####		Inspektorat	
6.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH			1,350,000,000	419,993,000	105,301,342	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.01.01.2.07.0001		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	1	Unit	450,000,000	-	0														-	0.00	0.00		Inspektorat	
6.01.01.2.07.0002		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	10	Unit	300,000,000																	0.00				
6.01.01.2.07.0005		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	3	Paket	250,000,000																	0.00				
6.01.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	3	Unit	150,000,000	13	419,993,000	8	105,301,342		-					0	0	0	0.00	13	419,993,000	433.33	####		Inspektorat	
6.01.01.2.07.0008		Pengadaan Aset Tak Berwujud Lainnya	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud Lainnya yang disediakan	-	0	-		0																			
6.01.01.2.07.0010		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1	Unit	200,000,000																					
6.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH			915,921,000	1,141,985,086	691,961,000	45,503,214	-	-	-	-	-	45,503,214			1,187,488,300										
6.01.01.2.08.0002		Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	Laporan	180,000,000	72	163,570,966	36	95,400,000	9	14,173,214					9	14,173,214	25.00	14.86	81	177,744,180	675.00	98.75		Inspektorat	

No	Sasaran OPD	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2024	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Yang Di Evaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
								I				II		III									IV			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		
6.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12	Laporan	735,921,000	23	978,414,120	12	596,561,000	3	31,330,000						3	31,330,000	25.00	5.25	26	1,009,744,120	216.67	137.21	Inspektorat
6.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH				800,000,000		465,300,103		124,930,000		24,609,664		-		-	-		24,609,664				489,909,767			
6.01.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	15	Unit	200,000,000	2	91,339,296	1	13,986,000		2,396,000						0	2,396,000	0.00	17.13	2	93,735,296	13.33	46.87	Inspektorat
6.01.01.2.09.0002		Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	15	Unit	200,000,000	12	57,195,160	6	34,004,000	2	12,375,164						2	12,375,164	33.33	36.39	14	69,570,324	93.33	34.79	Inspektorat
6.01.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	8	Unit	50,000,000	6	68,030,000	3	26,540,000	1	9,838,500						1	9,838,500	33.33	37.07	7	77,868,500	87.50	155.74	Inspektorat
6.01.01.2.09.0009		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1	Unit	200,000,000	1	248735647	1	50,400,000		-						0	0	0.00	0.00	1	248,735,647	100.00	124.37	Inspektorat
6.01.01.2.09.0011		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atu Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1	Unit	150,000,000																				
6.01.02	Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				4,750,000,000				1,046,676,800		125,176,500		-		-	-		125,176,500							
6.01.02.2.01		PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL				3,900,000,000		4,020,026,205		770,145,800		69,445,000		-		-	-		69,445,000				3,256,315,999			
6.01.02.2.01.0001		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	24	Laporan	550,000,000	42	539,164,900	12	36,059,000		-						0	0	0.00	0.00	42	539,164,900	175.00	98.03	Inspektorat
6.01.02.2.01.0002		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	24	Laporan	550,000,000	16	264,314,000	12	35,870,000		-						0	0	0.00	0.00	16	264,314,000	66.67	48.06	Inspektorat
6.01.02.2.01.0003		Revisi Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Kinerja	108	Laporan	550,000,000	216	761,766,499	108	152,889,000	98	49,500,000						98	49,500,000	90.74	32.38	314	811,266,499	290.74	147.50	Inspektorat
6.01.02.2.01.0004		Revisi Laporan Keuangan	Jumlah Laporan hasil Revisi Laporan Keuangan	37	Laporan	200,000,000	74	67,126,600	37	37,682,200		-						0	0	0.00	0.00	74	67,126,600	200.00	33.56	Inspektorat
6.01.02.2.01.0005		Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	20	Laporan	1,000,000,000	28	1,199,632,300	37	162,143,200		-						0	0	0.00	0.00	28	1,199,632,300	140.00	119.96	Inspektorat
6.01.02.2.01.0006		Kerja sama Pengawasan Internal	Jumlah kesepakatan Pengawasan Internal yang terbentuk	2	Kesepakatan	600,000,000	4	-	2	277,874,000		-						0	0	0.00	0.00	4	-	200.00	0.00	Inspektorat
6.01.02.2.01.0007		Monitoring dan evaluasi Tindak lanjut HASIL Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Pemeriksaan AP/PP	Jumlah Dokumen hasil monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan AP/PP	2	Dokumen	450,000,000	4	354,866,700	4	67,628,400	1	19,945,000						1	19,945,000	25.00	29.49	5	374,811,700	250.00	83.29	Inspektorat
6.01.02.2.02		PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU				850,000,000		486,488,450		276,531,000		55,731,500		-		-	-		55,731,500				542,219,950			
6.01.02.2.02.0001		Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/ daerah yang ditangani	2	Laporan	300,000,000																				
6.01.02.2.02.0002		Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	12	Laporan	550,000,000	24	486,488,450	12	276,531,000	2	55,731,500						2	55,731,500	16.67	20.15	26	542,219,950	216.67	98.59	Inspektorat
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				1,900,000,000		650,647,962		464,258,400		-		-		-	-		-				650,647,962			
6.01.03.2.01		PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN DAN FASILITASI PENGAWASAN				500,000,000		204,877,600		108,832,000		-		-		-	-		-				204,877,600			
6.01.03.2.01.0001		Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang disusun	4	Rekomendasi	200,000,000		-		-																
6.01.03.2.01.0002		Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang disusun	2	Rekomendasi	300,000,000	4	204,877,600	2	108,832,000		-						0	0	0.00	0.00	4	204,877,600	200.00	68.29	Inspektorat
6.01.03.2.02		PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				1,400,000,000		445,770,362		355,426,400		-		-		-	-		-				445,770,362			
6.01.03.2.02.0001		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	6	Perangkat Daerah	450,000,000	8	64,462,000	4	66,798,200		-						0	0	0.00	0.00	8	64,462,000	133.33	14.32	Inspektorat

No	Sesuai OPD	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Rencana OPD Kabupaten pada Tahun 2023 s/d 2025	Realisasi Capaian Kinerja Rencana OPD Kabupaten sampai dengan Rencana OPD Tahun 2024	Target Kinerja dan Anggaran Rencana OPD Kabupaten Tahun berjalan yang direalisasi (2025)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana PD Yang Di Evaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana Pengkaji Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Rencana PD Tahun 2025)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Rencana Pengkaji Daerah s/d Tahun 2022 (%)	Unit Pengkaji Daerah Penanggung Jawab																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
							I				II								III				IV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
							1	2	3	4	5	6	7	8					9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
6.01.20.2.02.0002		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Pembiayaan Reformasi Perilaku	Jumlah Pengkaji Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Pembiayaan Reformasi Perilaku	26	Pengkaji Daerah	230,000,000	20	111,281,800	10	29,700,000							0	0.00	0.00	27	111,281,800	79.92	44.51	Inspetkasi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
6.01.03.2.02.0003		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pengawasan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pengawasan dan Pemberantasan Korupsi	5	Kegiatan	450,000,000	8	120,679,890	5	205,000,000							0	0.00	0.00	8	130,679,890	160.00	29.54	Inspetkasi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
6.01.06.2.02.0004		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Pengkaji Integritas	Jumlah Pengkaji Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Pengkaji Integritas	5	Pengkaji Daerah	250,000,000	4	139,248,672	2	35,624,400							0	0.00	0.00	4	136,348,672	80.00	55.74	Inspetkasi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
						17,155,921,800		13,405,382,280		9,728,997,288							14,982,787,228		14,778,899,531																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							



LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN APBD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
KEADAAN PER 31 MARET 2025

Nama OPD : Inspektorat

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Belanja Operasional	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Total Pagu	Realisasi Belanja Operasional			Realisasi Belanja Modal			Total Realisasi			Sisa		
		Dana (Rp)					Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan	
								Rp	(%)		Rp	(%)		(Rp)	(Rp)		(%)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	7,076,060,746	134,001,342			7,210,062,088	18.3	1,317,611,228	18	0.00	-	18.3	1,317,611,228	81.7	5,892,450,860	81.73		
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,465,099,846				4,465,099,846	25.1	1,118,930,330	25.06			25.1	1,118,930,350.00	24.9	3,346,169,496	74.94		
	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2,784,151,261				2,784,151,261	25.2	702,831,406	25.24			25.2	702,831,406.00	24.8	2,081,319,855	74.76		
	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1,680,948,585				1,680,948,585	24.8	416,098,944.00	24.75			24.8	416,098,944.00	25.2	1,264,849,641	75.25		
	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	108,530,000				108,530,000	8.3	8,900,000	8.28			8.3	8,900,000.00	91.7	99,630,000	91.72		
	3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	543,270,000				543,270,000	2.7	14,710,100	2.71			2.7	14,710,100.00	97.3	528,559,900	97.29		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi																	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah																	
	4 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7,902,500				7,902,500	-	-	-			-	-	100.0	7,902,500	100.00		
	5 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4,657,000	28,700,000			33,357,000								100.0	33,357,000	100.00		
	6 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	86,134,000				86,134,000	16.1	13,888,200	16.12			16.1	13,888,200.00	83.9	72,245,800	83.83		
	7 Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	15,000,000				15,000,000	8.2	1,234,500	8.16			8.2	1,234,500.00	91.8	13,765,500	91.84		
	8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perawatan Perundang-Undangan	30,000,000				30,000,000	5.3	1,600,000	5.33			5.3	1,600,000.00	94.7	28,400,000	94.67		
	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	998,576,000				998,576,000	8.8	88,155,200	8.83			8.8	88,155,200.00	91.2	910,420,800	91.17		
	10 Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya		105,301,342			105,301,342								100.0	105,301,342	100.00		
	11 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	95,400,000				95,400,000	14.9	14,173,214	14.86			14.9	14,173,214.00	85.1	81,226,786	85.14		
	12 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	506,561,000				506,561,000	5.3	31,330,000	5.25			5.3	31,330,000.00	94.7	565,231,000	94.75		
	13 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	13,986,000				13,986,000	17.1	2,396,000	17.13			17.1	2,396,000.00	82.9	11,590,000	82.87		
	14 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	34,004,000				34,004,000	36.4	12,375,164	36.39			36.4	12,375,164.00	63.6	21,628,836	63.61		
	15 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26,540,000				26,540,000	37.1	9,838,500	37.07			37.1	9,838,500.00	62.9	16,701,500	62.93		
	16 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	50,400,000				50,400,000												
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1,046,676,800				1,046,676,800	12.0	125,176,500	11.96			12.0	125,176,500.00	88.0	921,500,300	88.04		
	17 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	36,059,000				36,059,000	-	-	-			-	-	100.0	36,059,000	100.00		
	18 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	35,870,000				35,870,000	-	-	-			-	-	100.0	35,870,000	100.00		
	19 Revisi Laporan Kinerja	152,889,000				152,889,000	32.4	49,500,000	32.38			32.4	49,500,000.00	67.6	103,389,000	67.62		
	20 Revisi Laporan Keuangan	37,682,200				37,682,200	-	-	-			-	-	100.0	37,682,200	100.00		
	21 Pengawasan Desa	162,143,200				162,143,200	-	-	-			-	-	100.0	162,143,200	100.00		
	22 Kerjasama Pengawasan Internal	277,874,000				277,874,000	-	-	-			-	-	100.0	277,874,000	100.00		
	23 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APSP	67,628,400				67,628,400	29.5	19,945,000	29.49			29.5	19,945,000.00	70.5	47,683,400	70.51		
	24 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	276,531,000				276,531,000	20.2	55,731,500	20.15			20.2	55,731,500.00	79.8	220,799,500	79.85		
3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	464,258,400				464,258,400	-	-	-			-	-	100.0	464,258,400	100.00		
	26 Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Fasilitas Pengawasan	108,832,000				108,832,000	-	-	-			-	-	100.0	108,832,000	100.00		
	27 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	66,798,200				66,798,200	-	-	-			-	-	100.0	66,798,200	100.00		
	28 Pendampingan dan Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	29,700,000				29,700,000	-	-	-			-	-	100.0	29,700,000	100.00		
	29 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	205,303,800				205,303,800	-	-	-			-	-	100.0	205,303,800	100.00		
	30 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Pelaksanaan Integrasi	53,624,400				53,624,400	-	-	-			-	-	100.0	53,624,400	100.00		
	Jumlah	8,806,995,946	134,001,342			8,940,997,288	16.54	1,442,787,728	16.54	100.00	-	-	16.54	7,278,209,560	83.46			



**RENCANA KERJA PERUBAHAN
INSPEKTORAT KAB. KEPULAUAN MENTAWAI
TAHUN 2025**

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Pergeseran 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
					INSPEKTORAT				8.916.253.182,00	10.717.498.810,00	8.720.997.288,00	8.720.997.288,00						10,093.000.000,00		
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				8.916.253.182,00	10.717.498.810,00	8.720.997.288,00	8.720.997.288,00						10.093.000.000,00		
6	01				INSPEKTORAT DAERAH				8.916.253.182,00	10.717.498.810,00	8.720.997.288,00	8.720.997.288,00						10.093.000.000,00		
1	6	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	6.693.892.682,00	7.368.399.610,00	7.210.062.088,00	7.210.062.088,00						7.645.500.000,00		
	6	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kesejahteraan ASN dilingkungan Inspektorat Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	4.569.098.686,00	4.312.500.214,00	4.312.500.214,00	4.312.500.214,00			-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		5.160.000.000,00	INSPEKTORAT	
6	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	0	0	0							0	INSPEKTORAT	
6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan	37 Orang/bulan	4.437.818.686,00	4.187.700.214,00	4.465.099.846,00	4.465.099.846,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		5.000.000.000,00	INSPEKTORAT	
6	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN															
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	131.280.000,00	124.800.000,00	108.530.000,00	108.530.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		160.000.000,00	INSPEKTORAT	

[illegible]

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Pergeseran 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	749.925.000,00	1.000.070.200,00	998.576.000,00	998.576.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuaepejat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		825.000.000,00	INSPEKTORAT
6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kelancaran operasional pelaksanaan kegiatan OPD Terlaksananya Pengadaan BMD urusan Perangkat Daerah	100 persen 100 Persen	100 persen 100 Persen	49.664.000,00	154.015.881,00	154.015.881,00	154.015.881,00			-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		55.000.000,00	INSPEKTORAT
6	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	8 Unit	49.664.000,00	154.015.881,00	105.301.342,00	105.301.342,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuaepejat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		55.000.000,00	INSPEKTORAT
6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lancanya operasional perkantoran Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen 100 Persen	100 persen 100 Persen	823.072.496,00	681.761.000,00	681.761.000,00	681.761.000,00			-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		918.500.000,00	INSPEKTORAT
6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	94.980.996,00	95.900.000,00	95.400.000,00	95.400.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuaepejat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		104.500.000,00	INSPEKTORAT
6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	728.091.500,00	585.861.000,00	596.561.000,00	596.561.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuaepejat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		814.000.000,00	INSPEKTORAT
6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kinerja perangkat daerah sesuai dengan Tupoksi Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen 100 Persen	100 persen 100 Persen	123.720.000,00	281.598.715,00	281.598.715,00	281.598.715,00			-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		132.000.000,00	INSPEKTORAT
6	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	14.000.000,00	13.986.000,00	13.986.000,00	13.986.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuaepejat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		11.000.000,00	INSPEKTORAT
6	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Paialk dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Prakiraan maju rencana tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Pergeseran 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	6 Unit	29.980.000,00	34.004.000,00	34.004.000,00	34.004.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		33.000.000,00	INSPEKTORAT
6	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	3 Unit	29.920.000,00	26.540.000,00	26.540.000,00	26.540.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		33.000.000,00	INSPEKTORAT
6	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	49.820.000,00	207.068.715,00	50.400.000,00	50.400.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		55.000.000,00	INSPEKTORAT
2	6	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Meningkatnya Kepuasan Stakeholder Persentase tindak lanjut temuan Kapabilitas APIP	100 88 level 3 Persen level	100 88 level 3 Persen level	1.917.371.100,00	2.572.551.500,00	1.046.676.800,00	1.046.676.800,00						2.112.000.000,00	
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	MENINGKATNYA KEPATUHAN PENYELENGGARA PEMERINTAH TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Terlaksananya Pengawasan Internal	100 Persen 88 Persen	100 Persen 88 Persen	1.767.386.700,00	2.220.025.300,00	2.220.025.300,00	2.220.025.300,00			-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		1.947.000.000,00	INSPEKTORAT
6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah														
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	12 Laporan	12 Laporan	238.308.000,00	199.655.800,00	36.059.000,00	36.059.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		264.000.000,00	INSPEKTORAT
6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah														
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	12 Laporan	12 Laporan	129.837.400,00	199.466.800,00	35.870.000,00	35.870.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		143.000.000,00	INSPEKTORAT
6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja														
						Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	108 Laporan	108 Laporan	220.002.000,00	627.339.000,00	152.889.000,00	152.889.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		242.000.000,00	INSPEKTORAT
6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan														
						Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	37 Laporan	37 Laporan	49.823.400,00	67.763.600,00	37.682.200,00	37.682.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		55.000.000,00	INSPEKTORAT
6	01	02	2.01	0005	Pengawasan Desa														
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	37 Laporan	37 Laporan	649.449.000,00	579.499.600,00	162.143.200,00	162.143.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		715.000.000,00	INSPEKTORAT
6	01	02	2.01	0006	Keria Sama Pengawasan Internal														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Pergeseran 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
						Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	2 Kesepakatan	2 Kesepakatan	329.981.000,00	296.300.500,00	277.874.000,00	277.874.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	363.000.000,00	INSPEKTORAT			
	6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP													165.000.000,00	INSPEKTORAT
						Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2 Dokumen	2 Dokumen	149.985.900,00	250.000.000,00	67.628.400,00	67.628.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	165.000.000,00	INSPEKTORAT			
	6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Meningkatnya Kepuasan Stakeholder MENINGKATNYA KEPUASAN STAKEHOLDER Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan dengan tujuan tertentu	100 Persen	100 Persen	149.984.400,00	352.526.200,00	352.526.200,00	352.526.200,00			-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	165.000.000,00	INSPEKTORAT		
	6	01	02	2.02	0001	Penanganan Penyelesaian														0	INSPEKTORAT
						Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	...Laporan	...Laporan	0	0	0		Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat					0	INSPEKTORAT		
	6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu														165.000.000,00	INSPEKTORAT
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	12 Laporan	12 Laporan	149.984.400,00	352.526.200,00	276.531.000,00	276.531.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	165.000.000,00	INSPEKTORAT			
3	6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase OPD yang telah menerapkan SPIP	88 %	88 %	304.989.400,00	776.547.700,00	464.258.400,00	464.258.400,00					335.500.000,00			
	6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Meningkatnya kepatuhan dan implemtasi perangkat daerah dalam menjalankan birokrasi	100 Persen	100 Persen	94.994.600,00	119.988.600,00	119.988.600,00	119.988.600,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	104.500.000,00	INSPEKTORAT		

[illegible]

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Prakiraan maju rencana tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Pergeseran 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	4 perangkat daerah	4 perangkat daerah	50.000.000,00	150.033.700,00	66.798.200,00	66.798.200,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		55.000.000,00	INSPEKTORAT
6	01	03	2.02	0002		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi														
						Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	10 perangkat daerah	10 perangkat daerah	49.994.800,00	99.989.600,00	29.700.000,00	29.700.000,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		55.000.000,00	INSPEKTORAT	
6	01	03	2.02	0003		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Pergeseran 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	2 perangkat daerah	2 perangkat daerah	50.000.000,00	79.994.000,00	53.624.400,00	53.624.400,00	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		55.000.000,00	INSPEKTORAT
J U M L A H										8.916.253.182,00	10.717.498.810,00	8.720.997.288,00	8.720.997.288,00						10.093.000.000,00	

